



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 157/IMSertifikasi-SK/XII/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan PHPL IUPHHK-HTI PT. BINA SILVA NUSA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT. BINA SILVA NUSA** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.286/Menhut-II/2007, tanggal 16 Agustus 2007, berlokasi di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, seluas ± 9.270 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 21 November – 26 November 2016
 3. Data pendukung penilikan kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT. BINA SILVA NUSA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 16 Desember 2016.

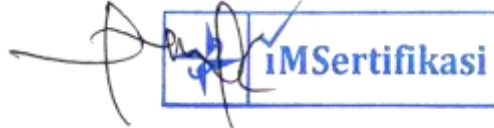
maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilikan kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HTI PT. BINA SILVA NUSA** dengan predikat kinerja **BAIK**.
 2. Menerbitkan sertifikat PHPL kepada **IUPHHK-HTI PT. BINA SILVA NUSA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
 7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat

- dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi / perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 Desember 2016
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT. BINA SILVA NUSA
KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- I. Nama LP-PHPL : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**
- a. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-015-IDN
 - b. Alamat Kantor : Jl. Ciremai Raya Blok BC no. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi
 - c. Telpon : 021-8844934
 - d. Website dan email : sertifikasimultima.wordpress.com
ims@intimultimasertifikasi.com
 - e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
 - f. Tim Audit : 1. Eko Nugrahaeni, MSi (Lead/ Auditor Sosial)
2. Ir. Indarjo (Auditor Bidang Produksi)
3. M. Ichsan Setyowibowo, S Hut (Auditor Prasyarat)
4. Ir. Indra Sofian (Auditor Ekologi)
5. Eka Prayudha, S.Hut (Auditor VLK)
 - g. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Dwi Harsono
- II. Nama IUPHHK-HA : PT. BINA SILVA NUSA**
- 1. SK IUPHHK-HT : SK No. SK. 286/Menhut-II/2007 tanggal 16 Agustus 2007 dan SK. 473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012
 - 2. Luas Areal : 9.270 Ha
 - 3. Lokasi : Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jl. Arteri Supadio Komp. Villa Ceria Lestari no. 1
Pontianak
Telpon : 0561-581416-581419 Fax: 0561 – 581417
 - 4. **Pengurus :**
 - Komisaris Utama : Mochamad Tabi'i
 - Komisaris : Lesmina Tandra
 - Komisaris : Nelly Agus
 - Direktur Utama : Rafli
 - Direktur Operasional : Ateng Surya Sandjaya
 - Direktur Keuangan : Camelita



I. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

No	Tahapan	Waktu dan tempat	Ringkasan Catatan
1.	Perjalanan Jakarta – Pontianak	20 November 2016	Tentatif
2.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	20 November 2016	Menyampaikan Pemberitahuan Penilikan dari Kementerian Kehutanan dan surat tugas dari lembaga sertifikasi PT. Inti Multima Sertifikasi
3.	Pertemuan Pembukaan	20 November 2016	Acara dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen dan staff lapangan perusahaan dengan acara utama penjelasan dari tim auditor tentang pelaksanaan kegiatan Audit Tahap II, terkait didalamnya adalah: tujuan, ruang lingkup, metode, acuan yang digunakan, tata waktu. Acara ditutup dengan penandatanganan BAP Pertemuan Pembukaan
4.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 November 2016	<ol style="list-style-type: none">1. Verifikasi dokumen, terutama tambahan dokumen sekunder yang tersedia di lapangan2. Identifikasi dan telaah dokumen pada masing-masing kriteria.3. Pengamatan lapangan pada obyek verifikasi yang memerlukan uji petik.4. Wawancara dengan masyarakat desa sekitar untuk verifikasi silang.5. Wawancara dengan personel unit manajemen yang bertanggung jawab6. Wawancara dengan narasumber terkait proses verifikasi masing-masing kriteria
5.	Pertemuan Penutup	24 November 2016	Pertemuan dihadiri oleh tim auditor dan pihak manajemen serta staff perusahaan. Agenda acara adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Paparan hasil temuan verifikasi lapangan untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh kedua belah pihak2. Penandatanganan lembar periksa dan verifikasi lapangan3. Penandatanganan berita acara penilaian lapangan4. Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara pertemuan penutupan
6	Koordinasi dengan instansi terkait	25 November 2016	Koordinasi dan mencari informasi setelah kegiatan audit lapangan
7.	Pengambilan Keputusan	20 November 2016	Dilaksanakan setelah hasil penilaian selesai disusun oleh Tim Audit. Keputusan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.



II. Resume Hasil Penilaian PHPL-VLK

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1.1 BAIK (3)	1.1.1	Baik	Ketersediaan dokumen legal PT BSN tidak mengalami perubahan yang substantif seperti pada Penilikan sebelumnya, hanya terdapat perubahan pada akta perusahaan yaitu adanya akta berita acara rapat penggantian susunan komisaris dan direktur di lingkungan PT BSN. Hasil Penilikan PHPL sebelumnya mendapatkan hasil dengan predikat Baik menjadikan PT BSN dapat mengesahkan RKTUPHHK-HT PT BSN secara mandiri atau self approval. Begitu pula dengan administrasi tata batas PT BSN tidak ada perbedaan dengan penilikan sebelumnya. Realisasi Tata batas telah temu gelang dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.473/Menhut- II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HT PT BSN seluas 9.270 Ha yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Prov. Kalbar.
	1.1.2	Baik	Luas definitif areal kerja IUPHHK-HTI PT BSN ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HT PT BSN seluas 9.270 Ha yang terletak di kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. PT BSN telah merealisasikan tata batas areal kerjanya hingga temu gelang berdasarkan Laporan TBT 1506 Tahun 2010.
	1.1.3	Baik	PT BSN telah mendapatkan pengakuan dari para pihak, baik dengan pihak pemerintah, perusahaan yang berbatasan langsung dengan areal kerja PT BSN maupun dari masyarakat sekitarnya. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HT PT BSN seluas 9.270 Ha yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat menjadi dasar luas areal yang disepakati para pihak di wilayah tersebut. Dalam periode audit satu tahun terakhir tidak pernah terjadi konflik areal namun demikian PT BSN telah menyiapkan Prosedur Standar Operasional mengenai konflik sosial yaitu Penyelesaian Konflik BSN-PRO-4.1B-ED.01 dan Mekanisme Pengelolaan Konflik BSN-PRO-4.1D-ED.0.
	1.1.4	N/A	Penafsiran Citra Satelit terakhir Tahun 2015 atas areal kerja PT BSN yang di-overlay dengan Peta Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT BSN Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tidak ada perubahan Fungsi Kawasan
	1.1.5	N/A	Tidak ada perbedaan yang substantif dengan Penilikan sebelumnya pada verifier Penggunaan Kawasan di Luar Sektor Kehutanan. tidak terdapat izin usaha perkebunan, kuasa pertambangan maupun fasilitas pemerintah (jalan, transmigrasi dan lain-lain) di dalam kawasan hutan produksi (dalam hal ini areal kerja IUPHHK-HTI PT BSN) yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur/Bupati) di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT BSN yang bersifat legal atau mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang.
1.2 BAIK	1.2.1	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi IUPHHK-HTI PT BSN yang ditandatangani oleh Direksi PT BSN pada tanggal 10 Maret 2002. visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari, yaitu pengelolaan hutan tanaman secara profesional yang menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi/lingkungan dan fungsi sosial.
	1.2.2	Baik	Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan pada tingkat manajemen perusahaan dan masyarakat. Visi misi perusahaan kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan sosialisasi RKT 2016 PT BSN.
	1.2.3	Sedang	Implementasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan pada pengelolaan hutan tanaman industri PT BSN seperti mendapatkan kepastian kawasan pengelolaan areal hutan tanaman industri dengan SK IUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman Nomor SK. 473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012, menyusun perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek, melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Tetapi masih ada beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan visi misi perusahaan seperti realisasi pemanenan yang tidak sesuai dengan rencana, terdapat ketidaksesuaian antara rencana penebangan pada RKT dengan RKT 2016, Sarana dan Prasarana perlindungan gangguan hutan seperti menara pemantauan kebakaran atau sarana penggantinya belum tersedia.
1.3 BAIK	1.3.1	Baik	Keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis PT BSN bidang kehutanan tahun 2016 di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan telah memenuhi syarat kecukupan jumlah dan jenisnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Dirjen PHPL P.16/PHPL-IPHH/2015. Sarjana kehutanan di lapangan PT BSN berjumlah 5 orang sedangkan GANIS PHPL PT BSN ada 7 orang dari 6 orang yang dipersyaratkan, terdiri dari 1 orang GANIS PHPL Kurpet, 1 orang GANIS PHPL Canhut, 1 orang GANIS PHPL Nenhut, 2 orang GANIS PHPL Binhut, dan 2 orang GANIS PHPL PKB. Prosentase



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			keberadaan GANIS PHPL PT BSN adalah 116,67 %
	1.3.2	Baik	Peningkatan Kompetensi SDM tahun 2016 telah dilakukan oleh PT BSN baik yang diselenggarakan eksternal maupun internal perusahaan. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT BSN dari identifikasi jumlah rencana pendidikan dan latihan yang akan diikuti dan realisasinya adalah sebesar 75 %
	1.3.3	Baik	Dokumen ketenagakerjaan PT BSN tersedia lengkap, antara lain dokumen Peraturan Perusahaan PT BSN no. 47/ADM/HRD/III/2015 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya No. KEP/391/PHI/IV/2015 tanggal 16 April 2015 tentang pengesahan peraturan perusahaan PT BSN, dokumen Laporan Bulanan Penggunaan Tenaga Kerja tahun 2016, dokumen usulan promosi, perpanjangan kontrak dan penyesuaian gaji karyawan, kartu peserta jamsostek untuk karyawan, dokumen/formulir perhitungan iuran bulanan program Jamsostek, pendaftaran tenaga kerja pada program Jamsostek dan rincian iuran tenaga kerja lapangan/harian lepas program Jamsostek tahun 2016 dan terdapat Struktur organisasi dan job deskripsi PT BSN.
1.4 SEDANG (2)	1.4.1	Sedang	PT BSN sudah memiliki Struktur Organisasi yang terbagi dalam dua bagian bagian yang berkedudukan di pusat dan bagian yang berkedudukan di Camp Sei Keluang. Struktur organisasi pada Penilaian III ini telah diperbarui dan menunjukkan adanya keseimbangan dalam tanggung jawab PHL yaitu kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial. Namun demikian masih ada posisi jabatan rangkap yang memungkinkan konflik kepentingan pada tanggung jawab kegiatan.
	1.4.2	Baik	PT BSN telah menerapkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen dalam pengelolaan hutan tanaman, tersedia tenaga pelaksana atau penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen dengan Surat Keputusan No 09/BSN-E.1/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pengangkatan Tenaga Pelaksana Sistem Informasi Manajemen. Perangkat sistem informasi manajemen PT BSN baik perangkat keras seperti komputer dan perangkatnya serta peralatan komunikasi, perangkat lunak berupa program/software maupun tenaga pelaksanaannya sudah mendukung dalam kegiatan pengelolaan hutan tanaman.
	1.4.3	Sedang	Sesuai dengan hasil audit sertifikasi PHPL PT BSN tahun 2015, bahwa tersedia unit SPI/internal auditor dalam struktur organisasi tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
	1.4.4	Sedang	Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan/kesalahan dalam pengelolaan hutan tanaman, dilakukan manajemen PT BSN dengan cara menyusun Prosedur Standar Operasional (PSO) pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan tanaman, peningkatan kompetensi SDM, pembentukan SPI/internal auditor dan pengawasan melekat dalam rangka monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Manajer Camp PT BSN secara langsung setiap hari kerja melalui kegiatan pertemuan rutin dalam lingkup bidang masing-masing. Tindakan perbaikan dilakukan apabila hasil proses monitoring dan evaluasi pada tingkat lapangan menemukan kendala/permasalahan di lapangan. tetapi tindakan perbaikan yang berbasis hasil monitoring dan evaluasi terutama temuan ketidaksesuaian hasil pengawasan yang dilakukan oleh SPI beberapa diantaranya belum dilakukan perbaikan dan belum ada rencana target waktu untuk perbaikan tersebut.
1.5 BAIK (3)	1.5.1	Baik	Kegiatan RKT 2016 PT BSN telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dengan Surat Keputusan Direksi PT BSN No 56/BSN-E.1/RKT/XII/2015 Tanggal 31 Desember 2015 Tentang RKTUPHHK-HTI Tahun 2016. RKT 2016 tersebut sudah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dengan Surat No 55/BSN-E.1/XII/2015 Tanggal 31 Desember 2015 perihal laporan pengesahan RKTUPHHK-HT PT BSN Tahun 2016. Sosialisasi kegiatan Rencana Kerja tahunan 2016 telah dilakukan kepada masyarakat yang diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2016. untuk mengetahui areal kerja RKT Tahun 2016 PT BSN. Lokasi RKT 2016 berada di Desa Tanjung Beringin. Terdapat Kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan Tanaman Kehidupan melalui Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan antara PT. BSN dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar dan Desa Betuah Kecamatan Terentang.
	1.5.2	Baik	Areal konsesi PT BSN berdasarkan Laporan TBT No 1506 Tahun 2010 telah temu gelang sebagai hasil pengukuran dan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja IUPHHK-HT. Areal kerja PT BSN seluas 9.270 Ha dengan panjang batas 41.067 m. Untuk menjamin kepastian hukum atas areal kerja maka hasil penataan batas IUPHHK-HT tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.473/Menhut-II/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan Batas Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Tanaman PT BSN seluas 9.270 Ha yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat dokumen Berita Acara



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			tanggal 24 November 2009, tentang pelaksanaan pengukuran dan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja IUPHHK-HTI PT BSN dengan PT Sari Bumi Kusuma di Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat yang telah ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti persetujuan dari para pihak.
	1.5.3	Baik	Rencana jangka panjang berkaitan dengan kegiatan CSR/CD PT BSN telah disusun dan dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang (Revisi RKUPHHK-HT periode 2009 – 2018), rencana jangka pendek (RKTUPHHK-HT PT BSN tahun 2016) dan dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial PT BSN tahun 2016. Pada pelaksanaan CSR 2016 pihak masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan program-program CSR dengan diterimanya proposal atau pengajuan dari masyarakat dan sebaliknya beberapa program CSR/CD PT BSN yang telah diterima oleh masyarakat.
	1.5.4	Baik	Kawasan lindung yang ditetapkan PT BSN telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan adanya Pengesahan dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT BSN SK. 63/VI-BUHT/2014 dan peta lampiran Revisi RKUPHHK-HT PT BSN SK. 63/VI-BUHT/2014 yang merinci jenis-jenis kawasan lindung, PT BSN telah menetapkan kawasan lindung di areal PT BSN berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BSN No 31.a/BSN-E.1/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Areal Kerja PT BSN. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang kawasan lindung telah dilakukan pada tanggal 19 Maret 2016 bertempat di halaman kantor pusat PT BSN Kalimantan Barat di Pontianak.

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
2.1. Baik (3)	2.1.1.	Baik	PT BSN telah melakukan revisi RKU pada bulan 18 Desember 2014. Mendapat surat dari Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan No. SK 63/VI-BUHT/2014, tentang persetujuan RKUPHHK-HTI periode tahun 2009 – 2018 an. PT BSN. Telah dibuat deliniasi mikro untuk menyusun rencana penataan ruang.
	2.1.2	Baik	PT BSN telah melaksanakan penataan blok dan petak dilapangan. Batas blok dan petak dibuat kanal, dipasang papan nama, pal dan kanal dibersihkan/dipelihara. Penataan batas tersebut telah sesuai dengan rencana kerja dalam peta RKT 2016
	2.1.3.	Baik	PT BSN telah melakukan pemeliharaan batas/kanal dimaksudkan untuk persiapan pemanenan pada Petak yang bersangkutan sebagai jalur pengangkutan kayu dengan menggunakan bis air/rakit dan dalam rangka pemeliharaan. Pada petak tanaman dilakukan pemeliharaan secara intensif hingga tanaman berusia sampai dengan umur 4 tahun, termasuk pemeliharaan kanal sebagai sarana transportasi, sehingga batas blok/petak berupa kanal terlihat jelas dilapangan
2.2. SEDANG	2.2.1	Sedang	PT.BSN telah memiliki data potensi tahun 2016 untuk tegakan per tipe ekosistem dari hasil survei potensi/cruising/ITSP dengan peta RKT hanya sebagai pendukungnya. Diketahui potensi tegakan hutan tanaman untuk URKT 2017 adalah 59,34 m ³ /ha. Total rencana volume tebang tahun 2017 adalah 67.531,35 m ³ .
	2.2.2	baik	PT BSN telah melakukan pengamatan terhadap riap pertumbuhan tanaman, berdasarkan hasil perhitungan monitor perkembangan tanaman, diketahui data tentang riap pertumbuhan tanaman pada kondisi masak tebang dapat diketahui, yaitu pada saat tanaman berumur 6 tahun sebesar 126,46 m ³ /hektar/tahun.
	2.2.3	sedang	Jatah tebang tahunan diperhitungkan berdasarkan hasil cruising (ITSP). Jatah tebang tahunan tahun 2016 adalah sebesar 66.178,76 m ³ , untuk rencana jatah tebang tahunan tahun 2017 berdasarkan hasil cruising adalah sebesar 67.531,35 m ³ . Telah dilakukan analisis data potensi dan upaya pengamatan riap tegakan untuk tahun terakhir dan tersedia laporannya.
2.3 Sedang	2.3.1.	Sedang	SOP PWH sudah disesuaikan dengan ketentuan teknis mengenai Hutan Tanaman. Namun SOP penebangan ramah lingkungan masih belum sesuai ketentuan teknis Hutan Tanaman.
	2.3.2	Baik	PT BSN telah melaksanakan tahapan system silvikultur berupa: penataan areal kerja pada blok RKT 2016 berupa kanal dan papan nama; kegiatan cruising pada blok RKT tahun 2016 dan tahun 2017; kegiatan PWH berupa pembangunan sarana transportasi berupa kanal; persemaian permanen di camp S. Kaluang; Kegiatan penanaman: dan kegiatan penebangan.
	2.3.3.	sedang	Potensi per hektar tanaman tahun 2012 atau untuk rencana tebang RKT 2017 adalah sebanyak 81,00 m ³ . Potensi tanaman per hektar tahun tanam 2013 atau untuk rencana tebang RKT 2018 adalah sebanyak 78,70 m ³ .
	2.3.4	sedang	Persen tumbuh untuk tanaman Acacia Mangium.tahun 2014 atau untuk tebang RKT 2019 adalah sebesar 87,89%. Persen tumbuh tanaman tahun 2015 adalah sebesar 92,19% dan persen tumbuh tanaman tahun 2016 sebesar 98,75%.



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
2.4 BAIK	2.4.1	sedang	Sudah ada revisi SOP, telah disesuaikan dengan karakteristik areal yang merupakan lahan rawa. Pembahasan/prosedur mengenai kanal yang merupakan jalan utama lalu lintas kegiatan HT sudah dibuat. Namun dalam penataan zona masih disebutkan mengenai cagar budaya dan hutan lindung serta dalam penebangan memuat penebangan pohon besar berbanir dll, menunjukkan karakter yang berbeda dengan kondisi areal IUPHHK-HT PT. BSN, SOP masih membahas mengenai jalan ongkak.
	2.4.2	Baik	PT.BSN telah menerapkan teknologi ramah lingkungan dari tahap perencanaan, pemanenan, pemeliharaan dan K3 serta paska pemanenan, yaitu berupa: pemeliharaan batas petak; penebangan dengan limbah minimal; keberadaan camp tebangan, alat angkut kayu, ponton; air bersih, pembuangan limbah, fasilitas tambahan dan perlengkapan standard minimal keselamatan kerja. Dalam kegiatan paska pemanenan terdapat penyiapan lahan, pemasangan ajir, mutasi bibit, penanaman dan terdapat penanaman rehabilitasi; dan perlengkapan K3.
	2.4.3	baik	Kegiatan penebangan di lakukan secara efektif dimana rata-rata tunggak yang ditinggalkan setinggi ± 10 cm dan pemanfaatan batang sampai dengan diameter ± 5 cm, sehingga dapat meminimalkan limbah yang ditimbulkan.
2.5 BAIK (3)	2.5.1	baik	Revisi RKUPHHK-HTI PT BSN telah disahkan oleh pihak yang berwenang pada tahun 2014. Rencana Kegiatan PT BSN dalam RKT 2016 masih dibawah dari rencana RKUPHHK-HTI, yaitu rencana pemanenan, pengadaan bibit dan penanaman. PT BSN telah mempunyai rencana jangka pendek RKT 2016 yang sah dan disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI.
	2.5.2	Sedang	Terdapat sebagian petak dalam RKUPHHK-HTI yang tidak dimasukkan dalam rencana RKT 2016. Jumlah petak dalam peta RKT 2016 adalah 12. Dalam RKUPHHK-HTI untuk rencana tahun 2016 adalah 17 petak, untuk no petak 73 sampai dengan no petak 77 tidak dimasukkan dalam RKT 2016, karena alasan kondisi gambut yang tinggi sehingga pertumbuhan tanaman kurang bagus. Untuk lokasi kawasan dilindungi dan lokasi sarana prasarana tidak berubah.
	2.5.3	Baik	PT BSN telah mengimplementasikan penandaan peta kerja di lapangan, berupa penandaan sarana prasarana Camp, TPK, Persemaian, penandaan blok,petak, batas kawasan lindung KPPN. Penandaan tersebut di lapangan terlihat jelas.
	2.5.4.	baik	Rencana luas tebangan tahun 2015 seluas 1.666,78 Ha dan realisasi luas tebangan seluas 1.077,78 Ha. Rencana volume tebangan tahun 2015 sebesar 109.865,49 m ³ , dan realisasi volume tebangan sebesar 43.724,49 m ³ . Persentase luas tebangan tahun 2015 sebesar 64,66%, dan persentase realisasi produksi adalah sebesar 39,80%.
2.6 Sedang (2)	2.6.1	Buruk	Pada tahun 2014 diketahui tingkat likuiditas sebesar 213,12%, dimana nilainya diatas 100%, Tingkat solvabilitas 131,22%, nilai rentabilitasnya negatif (-2,73%). Pada tahun 2015 diketahui tingkat likuiditas sebesar 174,65%, Tingkat solvabilitas 125,17%, nilai rentabilitasnya negatif (-3,55%).
	2.6.2	Baik	Rencana anggaran perusahaan hutan tanaman tahun 2014 sebesar Rp. 11.053.571.100,-, dan realisasinya sebesar Rp. 8.793.540.278,-. Tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan tanaman pada tahun 2014 sebesar 79,55%.
	2.6.3	Sedang	Realisasi pendanaan yang dilakukan PT BSN adalah rata-rata sebesar 79,55%, dengan simpangan sebesar 20,45%.
	2.6.4	Sedang	Diketahui bahwa rencana anggaran perusahaan hutan tanaman tahun 2014 sebesar Rp. 11.053.571.100,-, dan realisasinya sebesar Rp. 8.793.540.278,-, tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan tanaman pada tahun 2014 sebesar 79,55%. Persentase realisasi fisik pembinaan yang dilakukan oleh PT. BSN pada tahun 2015 sebesar 90,96%. Realisasi fisik pengadaan bibit tahun 2015 adalah sebesar 65,35%, realisasi penanaman tahun 2015 adalah sebesar 68,74%. Realisasi produksi tahun 2015 adalah sebesar 39,80%.
	2.6.5	Baik	Rencana anggaran penanaman, pemeliharaan, pengendalian kebakaran & pengamanan hutan, dan pengembangan yang tertuang dalam RKAP tahun 2014 adalah sebesar Rp. 4.775.362.500,-. Dalam laporan keuangan tahun 2014 realisasi anggaran penanaman, pemeliharaan, pengendalian kebakaran & pengamanan hutan, dan pengembangan sebesar Rp. 5.558.692.757,-. Dengan demikian persentase realisasi anggaran tersebut tahun 2014 sebesar 116,40%.
	2.6.6.	Baik	Realisasi kegiatan pembinaan hutan tahun 2015 sebesar 90,96%;

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
3.1 Baik (3)	3.1.1	Baik (3)	Kawasan lindung PT. BSN telah mendapat pengukuhan dari perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi No. 31.a/BSN-E.1/X/2016 tentang Penetapan Kawasan Lindung Di Areal Kerja PT. Bina Silva Nusantara yang ditandatangani oleh Ateng Surya



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>Sandjaya (Direktur Operasional) tanggal 20 Oktober 2016 seluas 1.482 ha dengan rincian areal KPPN seluas 1.256 ha dan sempadan sungai seluas 266 ha. Jenis dan luas kawasan lindung tersebut sesuai dengan dokumen induk rencana perusahaan yaitu Dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT. BSN Industri Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2009 – 2018.</p> <p>Areal KPPN ditempatkan di kawasan dengan penutupan hutan rawa sekunder, belukar tua dan belukar muda dan semak. Sedangkan kawasan lindung sempadan sungai ditempatkan di kanan dan kiri sungai dengan lebar 50 m dari bibir sungai. Dengan demikian ke-2 jenis kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisik lapangan.</p>
	3.1.2	Baik (3)	<p>Penataan batas kawasan lindung PT. BSN sampai dengan tahun 2016 telah mencapai 100 %. Tanda batas berupa kanal baik di areal KPPN maupun di sempadan sungai. Implementasi kelola tanda kawasan lindung selama periode tahun 2015 – 2016 berupa pemeliharaan papan nama dan tanda batas kawasan lindung.</p>
	3.1.3	Sedang (2)	<p>Penutupan kawasan lindung PT. BSN berupa hutan rawa sekunder, belukar tua dan belukar muda dan semak. Adapun kawasan lindung yang masih berhutan (LOA) teridentifikasi seluas 917 ha atau setara dengan 61,88 % dari total luas kawasan lindung.</p> <p>Upaya rehabilitasi kawasan lindung baru mencapai 2,5 ha atau setara dengan 33,74 % dari total luas yang akan direhabilitasi.</p>
	3.1.4	Baik (3)	<p>Terdapat bukti-bukti pengakuan kawasan lindung oleh pihak-pihak tertentu, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah : disahkannya dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT. BSN dan diterimanya dokumen RKTUPHHK-HT PT. BSN Tahun 2016 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. - Manajemen PT. BSN : pengukuhan kawasan lindung oleh direksi, tindak kelola kawasan lindung - Masyarakat sekitar areal : sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat yang dilengkapi dengan daftar hadir, penataan batas kawasan lindung secara partisipatif bersama masyarakat, dll
	3.1.5	Baik (3)	<p>Selama kurun waktu 1 tahun terakhir, PT. BSN telah menyusun beberapa dokumen laporan kelola untuk seluruh kawasan lindung hasil tata ruang diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Identifikasi Dan Analisa HCVF PT. BSN tahun 2015. - Sosialisasi HCVF (High Konservation Value Forest)/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di PT. BSN 2016. - Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Pengamatan Flora Di Sempadan Sungai dan Kawasa Lindung 2016. - Rencana Dan Realisasi Rehabilitasi Sempadan Sungai Keluang 2016 - Laporan Realisasi dan Biaya Sosialisasi Kepada Karyawan Tentang Pentingnya Menjaga Areal-Areal Lindung 2016. - Laporan Kegiatan Pemeliharaan Tata Batas 2015, dll
3.2 BAIK	3.2.1	Baik (3)	<p>Tersedia dokumen-dokumen prosedur kerja perlindungan dan pengamanan hutan yang disusun tahun 2010. Dokumen-dokumen tersebut mencakup seluruh potensi gangguan yang ada di areal kerja PT. BSN dan sampai tahun 2016 belum mengalami revisi.</p>
	3.2.2	Sedang (2)	<p>Sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan PT. BSN mencakup sarana untuk perlindungan dari gangguan illegal logging, kebakaran hutan dan perburuan satwa liar. Namun sarana perlindungan PT. BSN belum sepenuhnya lengkap, karena sarana pemantau kebakaran hutan belum tersedia sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan pada dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT BSN SK. 63/VI-BUHT/2014.</p>
	3.2.3	Sedang (2)	<p>PT. BSN telah menyusun Struktur Organisasi Tingkat Camp dan Struktur Organisasi Satuan DAMKARHUT. Dengan demikian wewenang, tugas dan tanggung jawab perlindungan hutan PT. BSN telah terdistribusi dengan baik. Selain itu, PT. BSN telah memiliki 2 orang karyawan dengan kualifikasi GANIS BINHUT. Dengan demikian, pemenuhannya terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 sebesar 200 %.</p>
	3.2.4	Sedang (2)	<p>Implementasi perlindungan hutan dari gangguan selama kurun 1 tahun terakhir dilakukan dengan tindakan tertentu yaitu : pemeliharaan sarana-prasarana pengamanan dan perlindungan hutan, penelitian dan pengembangan, sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat terkait dengan perlindungan jenis flora fauna dan keutuhan habitat, peningkatan SDM dengan mengadakan pelatihan serta tindakan represif dengan melakukan penangkapan pelaku illegal logging. Namun tindakan pengamanan hutan terhadap bahaya kebakaran hutan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik terutama menyangkut peringatan dini kabakaran hutan.</p>



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			Hal ini terkait dengan penyediaan sarana pemantau kabakaran hutan.
3.3 Sedang	3.3.1	Baik (3)	Tersedia dokumen prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh potensi dampak besar dan penting yang diperkirakan ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan hutan. Dokumen-dokumen tersebut sampai dengan tahun 2016 masih dinilai relevan oleh pemegang izin, sehingga tidak direvisi.
	3.3.2	Baik (3)	Sarana kelola dampak PT. BSN terdiri dari sarana kelola dampak secara sipil teknis seperti jaringan kanal, pintu air, gudang penyimpanan oli dan suku cadang bekas, bangunan pelindung untuk instalasi pembangkit listrik, tempat sampah keluarga dll. Adapun sarana kelola vegetatif berupa tanaman yang ditanam di sempadan sungai untuk konservasi tanah dan air. Sarana pemantauan dampak yang dimiliki berupa OMBROmeter dan perangkat pemantau iklim lainnya seperti pengukur kecepatan angin, arah angin, intensitas cahaya dll, peizometer, water table, peilschaal, patok subsidi. Sarana-sarana tersebut masih berfungsi dengan baik.
	3.3.3	Baik)	Berdasar struktur organisasi tingkat camp, pengelolaan dan pemantauan dampak menjadi tanggung jawab Bagian Pembinaan HTI. Adapun kecukupan SDM berdasar GANIS BINHUT telah sesuai dengan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 yaitu mencapai 200 %. Adapun karyawan yang memiliki kartu GANIS BINHUT atas nama Zamzam Nurzaman, S.Hut dan Andri Supriatno.
	3.3.4	Sedang (2)	Sebagian besar rencana kelola dampak telah terealisasi. Sebagian kecil lainnya masih belum sesuai dengan yang direncanakan. Adapun kelola dampak yang belum sesuai rencana adalah kelola dampak untuk limbah yang berpotensi menjadi polutan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) seperti bangunan pembangkit listrik yang belum belum kecap air dan belum dilengkapi dengan saluran drainase untuk cecceran oli/BBM. Selain itu, masih ditemukan sampah plastik di pondok-pondok kerja yang telah ditinggalkan dan polybag bekas di area tanam.
	3.3.5	Sedang (2)	Sebagian rencana pemantauan telah terealisasi. Adapun rencana pemantauan yang belum terealisasi adalah pamantauan penurunan konsistensi dan permeabilitas tanah serta kandungan bahan organik tanah dan penurunan kualitas air. Analisa dampak penurunan konsistensi dan permeabilitas tanah serta kandungan bahan organik tanah tidak didasarkan pada data hasil analisa sampel tanah yang telah dilakukan. Sedangkan dampak penurunan kualitas air tidak dilengkapi dengandata hasil analisa lab terkini.
	3.3.6	Sedang (2)	Dampak erosi, sedimentasi dan degradasi struktur tanah dimungkinkan kecil, karena areal kerja PT. BSN tergolong datar (0 – 8 %). Adapun dampak yang belum diketahui dengan pasti adalah penurunan konsistensis dan kandungan organik tanah. Selain itu penurunan kualitas air sungai untuk 1 tahun terakhir ini tidak terpantau dengan baik, karena PT. BSN belum melakukan uji laboratoriu untuk sampel air permukaan/sungai. Indikasi dampak terhadap air sungai dimungkinkan , mengingat PT. BSN menggunakan alat berat dalam melakukan pengelolaan hutan termasuk menggunakan pupuk kimia yang dapat menajdi bahan polutan bagi air sungai.
3.4 Baik	3.4.1	Baik (3)	PT. BSN telah menyusun dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Dokumen yang disusun tahun 2010 tersebut sampai dengan tahun 2016 tidak direvisi.
	3.4.2	Baik (3)	Tahun 2015, PT. BSN telah menyelesaikan pekerjaan identifikasi areal yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Hasil kegiatan tersebut dirangkum pada dokumen Laporan Hasil Identifikasi Dan Analisis HCVF PT. BSN 2015. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, dilakukan identifikasi seluruh potensi jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Untuk jenis flora ditemukan 8 jenis yang dikategorikan dilindungi berdasar PPRI NO 7 Tahun 1999 dan sebagaian lainnya dinyatakan rawan berdasar CITES dan IUCN. Sedangkan jenis-jenis fauna dilindungi dan rawan yang ditemukan cukup beragam dan sebagian besar berada di areal KPPN.
3.5 Baik (3)	3.5.1	Baik (3)	Dokumen-dokumen prosedur kerja pengelolaan flora yang disusun tahun 2010 telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal pemegang izin. Dokumen-dokumen tersebut sampai dengan tahun 2016 belum direvisi.
	3.5.2	Baik (3)	Implementasi kelola flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik selama kurun waktu 1 tahun terakhir mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Kelola habitat dengan pemeliharaan tanda kawasan lindung - Upaya perlindungan jenis dengan patroli pengamanan termasuk di kawasan lindung, sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan dan habitat - Identifikasi status perlindungan dan tingkat kerawanan jenis.
	3.5.3	Baik (3)	Jenis-jenis flora dilindungi yang tersisa di areal kerja PT. BSN umumnya berada di areal lindung (KPPN). Jenis-jenis yang berhasil diidentifikasi status perlindungan dan



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			tingkat kerawannya tersebut kondisinya relatif aman. Hal ini disebabkan gangguan yang terjadi di areal pemegang izin dan berpengaruh terhadap keberadaan dan kelimpahan jenis-jenis tersebut realtif jarang terjadi.
3.6 Baik (3)	3.6.1	Baik (3)	Prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang telah disusun PT. BSN sebanyak 6 jenis. Dokumen-dokumen yang disusun tahun 2010 telah mencakup seluruh jenis yang dikategorikan dilindungi dan rawan. Sampai dengan tahun 2016, dokumen-dokumen tersebut belum direvisi.
	3.6.2	Baik (3)	Implementasi kelola fauna telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Hal ini disebabkan PT. BSN tidak hanya mengelola habitat jenis-jenis tersebut (kawasan lindung sempadan sungai dan KPPN) tetapi juga mencakup kegiatan perlindungan spesies seperti perlindungan dengan patroli pengamanan dan sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat termasuk memasang papan larangan berburu di beberapa titik lokasi.
	3.6.3	Baik (3)	Potensi gangguan di areal kerja PT. BSN berupa kebakaran hutan, illegal logging, perambahan dan perburuan satwa liar. Namun gangguan-gangguan tersebut relatif jarang terjadi dan selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 gangguan-gangguan tersebut tidak ditemui. Dengan demikian kondisi jenis fauna dilindungi dan/atau langka, langka dan terancam punah dan endemik relatif aman.

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
4.1 Baik (3)	4.1.1	baik	PT. BSN telah menyusun dokumen yang menunjukkan pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat sekitar area kerja sesuai dengan kondisi terakhir (2015-2016), berupa dokumen Laporan Identifikasi dan Analisis HCVP PT BSN (2015) dan Laporan Penerapan Program Sosial (2016), dokumen perencanaan RKTUPHHK HT tahun 2015 dan tahun 2016.
	4.1.2	Sedang	PT. BSN telah memiliki mekanisme untuk penataan deliniasi batas kawasan hutan dan masyarakat, penyelesaian dan pengelolaan konflik. Mekanisme yang ada tidak berubah sejak tahun 2012. Mekanisme penyelesaian konflik tentang batas kawasan hutan telah diketahui oleh penduduk Desa Tanjung Beringin.
	4.1.3	baik	Pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat terkait dengan proses kegiatan PT.BSN atas kawasan kehidupan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar areal kerja telah terakomodir dalam prosedur yang ada. Telaah prosedur menunjukkan tidak terdapat perubahan terhadap mekanisme yang ada. Implementasi atas mekanisme pengelolaan dan pembagia hasil atas hasil produksi yang ada di areal tanaman kehidupan telah dituangkan dalam pernyataan kesepakatan bersama antara PT BSN dan penduduk Desa Tanjung Beringin.
	4.1.4	baik	PT. BSN telah membuat batas yang jelas antara areal kerja efektif dengan areal yang digarap oleh penduduk sekitar. Batas berupa pal batas area kerja PT BSN yang diketahui masyarakat Desa Tanjung Beringin.
	4.1.5	baik	Batas areal kerja PT. BSN telah temu gelang dan terdapat persetujuan batas areal kerja dan diketahui oleh masyarakat setempat. Disamping itu terdapat pula kesepakatan batas areal kerja dengan lahan garapan penduduk Desa Tanjung Beringin (RT 04) yang berlokasi tepat di batas area kerja PT BSN di sebelah tenggara.
4.2 SEDANG (2)	4.2.1	baik	PT.BSN telah menyusun dokumen rencana kegiatan perusahaan tahun 2015 dan 2016 berupa RKTUPHHK HTI 2015 dan RKTUPHHK HTI 2016 yang memuat rencana kegiatan kelola sosial. Detail kegiatan kelola sosial diuraikan dalam dokumen RO Kelola Sosial tahun 2015 dan 2016. Kegiatan yang menjadi fokus PT. BSN meliputi: Pengembangan sarana prasarana, peningkatan pendapatan masyarakat, usaha pelestarian SDH dan lingkungan, rencana kelola sosial bidang kelembagaan.
	4.2.2	baik	Mekanisme yang ada pada PT. BSN untuk pemenuhan tanggung jawab sosial tidak terdapat perubahan dalam tahun 2015-2016. PT. BSN telah memiliki dokumen prosedur yang sah dan legal untuk kegiatan kelola sosial berupa PMDH. Perencanaan kegiatan PT BSN untuk pemenuhan kewajiban kelola sosial disusun berdasar usulan masyarakat dan kewajiban tanggungjawab sosial perusahaan.
	4.2.3	Sedang	Pelaksanaan sosialisasi kegiatan PT.BSN 2016 dilakukan dengan menyampaikan kewajiban perusahaan sebagai pemegang izin IUPHHK HT dan perencanaan kegiatan operasional berupa pemanenan. Kegiatan sosialisasi telah terdokumentasi dalam bentuk berita acara kegiatan sosialisasi RKT PT BSN tahun 2016. Kegiatan diikuti perwakilan masyarakat dan aparat pemerintah Desa Tanjung Beringin dan stake holder terkait.
	4.2.4	Sedang	Kegiatan PMDH tahun 2016 oleh PT. BSN terekam bukti realisasinya dalam bentuk



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			BAP dan dokumentasi foto. Namun perencanaan kegiatan PMDH tahun 2016 belum seluruh rencana kegiatan dapat direalisasikan. Jumlah dan besaran kegiatan PMDH tidak maksimal. Kegiatan yang terealisasi sebagian meliputi bidang pendidikan, bantuan pembangunan sarana ibadah, kerja sama dengan KUB Desa Beringin, bantuan perayaan hari raya. Program tanaman kehidupan PT BSN terealisasi sesuai dengan rencana, yaitu pemanenan yang pertama kali tanaman acacia di areal tanaman kehidupan seluar 107 Ha.
	4.2.5	Sedang	Pelaksanaan kegiatan kelola sosial PT. BSN telah terdokumentasi dalam bentuk berita acara, laporan tenaga kerja, dokumen perjanjian kerja sama kemitraan dan laporan periodic pelaksanaan RKL-RPL kepada instansi terkait serta laporan kegiatan kelola sosial tahun 2015 untuk keperluan internal. Namun isi dokumen belum menunjukkan kegiatan kelola sosial yang dilakukan PT BSN dengan lengkap dan jelas.
4.3 BAIK	4.3.1	Sedang	PT. BSN telah memiliki data dan informasi tentang kondisi masyarakat sekitar areal kerja secara lengkap dari segi kependudukan, sosial ekonomi dan sosial budaya. Data diperoleh dari kegiatan Identifikasi dan analisis HCVF dan Penerapan Program Sosial Terhadap Masyarakat yang dilakukan pada tahun 2015. PT. BSN juga telah memperbaharui data monografi desa sekitar areal kerja perusahaan.
	4.3.2	Baik	PT. BSN telah memiliki mekanisme kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi yang dituangkan dalam prosedur yang telah sah dan legal, diantaranya mekanisme peningkatan akses masuk masyarakat ke dalam hutan untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, suplai logistic dari masyarakat setempat, penerimaan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi.
	4.3.3	baik	PT. BSN telah menyusun rencana kegiatan kelola sosial dalam upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam dokumen RKTUPHHK HTI 2015 dan 2016 serta dokumen RO PMDH 2015 dan RO PMDH 2016. Dokumen RO Kelola Sosial telah memuat rencana perusahaan dalam kegiatan kelola sosial secara lengkap dan jelas untuk kegiatan dalam tahun berjalan. Rencana realisasi tanaman kehidupan termuat dalam perencanaan kegiatan tahunan PT BSN.
	4.3.4	Baik	Kegiatan kelola sosial PT BSN yang telah direalisasikan dalam upaya peningkatan aktivitas ekonomi dan peran serta masyarakat sekitar adalah pembelian hasil pertanian dan perikanan dari masyarakat sekitar Batu Ampar, penyerapan tenaga kerja lokal, kerja sama dengan KUB Mitra Beringin dalam kegiatan yang berhubungan operasional perusahaan.
	4.3.5	Sedang	Pelaksanaan kegiatan PT.BSN terkait dengan distribusi manfaat kepada Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi kegiatan tertuang dalam bentuk berita acara, laporan kegiatan Kelola sosial dan bukti setor kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, walaupun masih ada kewajiban yang belum terpenuhi, serta Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disampaikan kepada instansi terkait.
4.4 Baik (3)	4.4.1	Baik	PT.BSN telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang dituangkan dalam prosedur operasi yang ada. Prosedur yang ada telah disusun dengan mengidentifikasi potensi konflik yang ada di wilayah sekitar areal kerja PT BSN.
	4.4.2	Baik	PT BSN telah membuat peta penyebaran potensi konflik di dalam areal kerja PT BSN. PT. BSN juga telah mengidentifikasi potensi konflik dikarenakan semakin terbatasnya lahan yang ada di sekitar pemukiman Desa Tanjung Beringin.
	4.4.3	Baik	PT. BSN telah memiliki organisasi yang bertugas menyelesaikan konflik yang timbul dikarenakan kegiatan perusahaan. Kelembagaan yang ada masih seperti struktur kelembagaan yang dibentuk tahun 2013, terdiri direksi, didukung manager forestry, kbid kelola sosial dan kaur sosial. Penyertaan stakeholder lain adalah polisi, tripika dan pemerintahan desa yang berkonflik dengan perusahaan.
	4.4.4	N/A	Tidak terdapat konflik dalam periode 1(satu) tahun terakhir (2015-2016).
4.5 BAIK	4.5.1	Baik	PT. BSN telah memiliki dokumen terkait hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Dokumen tersebut berbentuk Peraturan Perusahaan yang secara umum dapat diterapkan pada seluruh karyawan dalam grup perusahaan. PT BSN telah merealisasikan hubungan industrial yang termuat dalam dokumen PP diantaranya kepastian kerja karyawan dengan adanya kontrak kerja dan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap jika memenuhi syarat, keberadaan dan keanggotan perusahaan pada serikat pekerja diperbolehkan oleh perusahaan, prosedur penyelesaian keluhan dan kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial.
	4.5.2	Baik	PT. BSN telah merencanakan pengembangan kompetensi karyawan dengan penyertaan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang bersifat teknis berupa pemadaman kebakaran dan K3 serta penyertaan tenaga teknis Kehutanan.
	4.5.3	Baik	PT. BSN telah memiliki mekanisme untuk peningkatan jenjang karir karyawan sebagaimana yang termuat dalam PKB. Implementasinya ditelaah dari formulir-formulir terkait ketenagakerjaan yang ada. Dalam satu tahun terakhir (2015-2016)



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			terdapat kegiatan penilaian karyawan, mutase karyawan, pengangkatan karyawan dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap.
	4.5.4	Baik	<p>PT. BSN telah memenuhi kewajiban perusahaan terkait dengan kesejahteraan karyawan dalam lampiran SK IUPHHK HTI. Dokumen-dokumen yang ada terkait kesejahteraan karyawan telah merupakan implementasi peraturan perusahaan, meliputi fasilitas tempat tinggal, ibadah, olah raga, sarana kesehatan yang cukup layak dan memadai, serta perlengkapan K3.</p> <p>Prosedur K3 telah lengkap dan diimplementasikan dalam kegiatan operasional perusahaan. Laporan terkait K3 disusun oleh P2K3 dan dilaporkan kepada dinas terkait setiap semester.</p>



E. KRITERIA VLK

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor			
				Keterpenuhan	Argumen		
1	1.1	1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	PT. BSN telah memiliki dokumen perijinan yang lengkap dan sah berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.473/MENHUT-II/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dan peta lampirannya. Berdasarkan Hasil Overlay Peta Lampiran SK Penetapan Batas IUPHHK HT Nomor : SK.473/MENHUT-II/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dengan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran SK. Menhut No. SK.936/Menhut-II/2013, tanggal 20 Desember 2013) menunjukkan bahwa areal IUPHHK-HTI PT. BSN telah sesuai sebagai kawasan hutan produksi.		
			1.1.1 b	Memenuhi	IUPHHK-HT PT. BSN telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran IUPHHK pada tanggal 14 Mei 2004 yang jumlahnya sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan.		
			1.1.1.C	N/A	Tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.		
2	2.1	2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	Terdapat Revisi Rencana Kerja UPHHK-HTI untuk Jangka Waktu Sepuluh Tahun Periode 2009 – 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.63/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Desember 2014. Dokumen RKT Tahun 2014 IUPHHK-HT PT. BSN telah disahkan secara self approval melalui Surat Keputusan Direktur Produksi/Perencanaan (Ir. Fairus Mulia) Nomor : 19/BSN-A.3/II/2014, tanggal 25 Februari 2014 Dokumen RKT Tahun 2015 IUPHHK-HT PT. BSN diajukan oleh Cuncun Hidayat, S.Hut (Asbid Perencanaan) dan telah disahkan secara self approval melalui Surat Keputusan Direktur Utama (Rafli) Nomor : 95/BSN-A.3/RKT/XII /2014, tanggal 31 Desember 2014.		
			2.1.1 b	Memenuhi	Terdapat areal yang tidak boleh ditebang pada Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 dan 2015 berupa Kawasan Konservasi Insitu dan sempadan sungai. Penandaan batas dilapangan berupa pemasangan papan nama dan pemasangan pal batas serta penandaan batas berupa polet/cat merah pada batang pohon hidup.		
			2.1.1 c	Memenuhi	Peta lampiran RKT Tahun 2014 dan RKT Tahun 2015 telah dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan terbukti keberadaannya di lapangan berupa papan nama dan patok batas.		
			2.2.1 a	Memenuhi	Dokumen Rencana Kerja PT. BSN berupa dokumen Revisi RKUPHHK-HT dan lampirannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.63/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Desember 2014.		
			2.2.1 b	N/A	IUPHHK-HTI PT. BSN dalam kegiatan pengelolaan hutannya telah memasuki daur ke 2 (dua) sehingga penyiapan lahan untuk areal yang ditanami tidak lagi ada areal berupa hutan alam, sehingga verifier ini tidak dapat dinilai/NA (Not Applicable).		
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	Memenuhi	Seluruh kayu yang dipanen telah dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP) oleh Petugas Pembuat LHP dan telah disahkan oleh P2LHP yang berwenang. Dari hasil uji petik dokumen LHP dan Buku Ukur dapat diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara kedua dokumen tersebut		
			3.1.2	3.1.2.1	Memenuhi	IUPHHK-HTI PT. BSN melindungi kayu yang dikirim keluar areal kerja dengan dokumen FA-KB disertai dokumen DKBK sebagai lampirannya dan dokumen tersebut disahkan oleh pejabat yang telah ditunjuk oleh instansi yang berwenang.	
			3.1.3	3.1.3 a	Memenuhi	IUPHHK-HTI PT. BSN adalah pemegang izin IUPHHK-HTI bukan IUPHHK-HA	
			3.1.3 b	Memenuhi	Identitas pada kayu dicatat pada dokumen-dokumen tata usaha kayu yang berisi informasi yang sama.		
			3.1.4	3.1.4.1	Memenuhi	Dokumen FA-KB dan lampirannya telah disahkan oleh Ade Irma Suryani, yang telah ditetapkan sebagai Petugas Penerbit FA-KB di IUPHHK-HT PT. BSN.	
			3.2	3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan telah sesuai dengan LHP yang disahkan oleh P2LHP (kelompok jenis, volume dan tarif).



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Keterpenuhan	Argumen
			3.2.1 b	Memenuhi	SPP PSDH yang ditagihkan kepada IUPHHK-HT PT. BSN selama periode November 2014 – Oktober 2015 seluruhnya telah dibayar lunas dan nilainya telah sesuai.
			3.2.1 c	Memenuhi	Nilai Tarif SPP yang ditagihkan telah sesuai dengan PP. No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Permenhut No : P.68/Menhut-II/2014 tanggal 18 September 2014.
	3.3	3.3.1	3.3.1.1	N/A	Tidak terdapat dokumen PKAPT dikarenakan IUPHHK-HTI PT. BSN tidak mengirim kayu keluar pulau
		3.3.2	3.3.2.1	Memenuhi	Kapal pengangkut kayu yang digunakan oleh PT. BSN memiliki dokumen yang sah dan berbendera Indonesia.
	3.4.	3.4.1	3.4.1.1	N/A	PT. BSN belum menggunakan tanda V-Legal karena masih dalam tahap kontrak Sub Lisensi dengan Lembaga Sertifikasi.
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	Memenuhi	PT. BSN telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap yaitu dokumen ANDAL, RKL dan RPL dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisi AMDAL Kabupaten Pontianak dengan nomor SK : 660.1/56/KPDL-B, tanggal 08 April 2003.
		4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	Terdapat dokumen RKL dan RPL yang disusun berdasarkan dokumen AMDAL dan merupakan bagian dari dokumen AMDAL itu sendiri yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi AMDAL Kabupaten Pontianak dengan nomor SK : 660.1/56/KPDL-B, tanggal 08 April 2003.
			4.1.2 b	Memenuhi	Implementasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang terjadi dalam dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Periode II (Juli – Desember 2014) dan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Periode I (Januari – Juni 2015) IUPHHK-HT PT. BSN telah sesuai dengan rencana dalam dokumen RKL dan RPL
5	5.1	5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	Terdapat Dokumen Prosedur dan Struktur Organisasi K3 PT. BSN dan Dokumen Pedoman Pelaksanaan K3 PT. BSN, serta terdapat implementasi K3 dilapangan.
			5.1.1.b	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di lokasi Camp dan lokasi bekerja dan berfungsi dengan baik. Terdapat Klinik berikut mantrinya, serta terdapat prosedur penanganan korban kecelakaan.
			5.1.1 c	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja perperiodik dan mekanisme penanganannya serta ada upaya menekan tingkat kecelakaan. Selain itu sebagian karyawan bulanan telah diikutsertakan dalam program JAMSOSTEK.
	5.2	5.2.1	5.2.1.1	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja tetapi terdapat Peraturan Perusahaan (BAB IX pasal 44) yang isinya menyatakan kebebasan berserikat untuk karyawan oleh perusahaan.
		5.2.2	5.2.2.1	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang isinya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
		5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	Berdasarkan Laporan Penggunaan Tenaga Kerja Bulan November 2014, tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Terdapat Surat Perjanjian Kerja Harian dalam Pasal 1 yang mencantumkan pernyataan bahwa pihak pekerja telah berumur 18 Tahun.